

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengalami peningkatan angka harapan hidup pada tahun 2024. Angka harapan hidup di Indonesia mengalami peningkatan mencapai 72,50 tahun. Angka ini naik sebesar 0,24% dibandingkan tahun 2023, di mana angka harapan hidup tercatat sebesar 72,32 tahun (Mutiah, 2024). Tren peningkatan angka harapan hidup berdampak pada kebutuhan untuk menjadikan lansia sebagai individu yang sehat, produktif, dan berkontribusi, bukan sebagai beban bagi keluarga, masyarakat, atau negara. Menurut undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, seseorang dikategorikan sebagai lansia jika berusia 60 tahun ke atas. Di negara-negara maju, yang memiliki standar hidup lebih baik dalam aspek ekonomi dan kesehatan, batasan lansia ditetapkan pada usia 65 tahun ke atas. Prof. Haryono Soyono, PhD (Kepala BKKBN 1983-1997), membagi kategori lansia menjadi tiga kelompok berdasarkan rentang usia, yaitu lansia muda yang berusia antara 60 hingga di bawah 70 tahun, lansia dewasa dengan rentang usia 70 hingga di bawah 80 tahun, dan lansia paripurna yang berusia lebih dari 80 tahun.

Dengan melihat kategori tersebut, pada tahun 2024, penduduk Indonesia dengan harapan hidup 72,50 tahun termasuk dalam kelompok lansia dewasa (usia 70 - < 80 tahun). Data ini menunjukkan bahwa jumlah lansia di Indonesia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya angka harapan hidup. Di satu sisi, populasi lansia yang besar dapat menjadi sumber daya yang berharga, namun di sisi lain, hal

ini juga menimbulkan tantangan yang memerlukan solusi untuk memastikan kualitas hidup lansia tetap terjaga.

Semakin panjangnya masa pensiun, tantangan utama adalah bagaimana memastikan keberlanjutan kualitas hidup lansia, yang tidak hanya bergantung pada pensiun finansial, tetapi juga pada kegiatan yang memperkaya kehidupan mereka secara mental dan fisik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan aktivitas dan pelatihan pasca-pensiun yang dapat membantu lansia tetap aktif secara fisik, mental, dan sosial. Program-program pelatihan keterampilan dapat membantu lansia menjaga kesehatan mental dan fisik, serta memperpanjang usia produktif mereka. Berdasarkan data dari PWRI Kota Bekasi, diketahui terdapat peningkatan jumlah pensiunan pemerintahan Kota Bekasi setiap tahunnya.

Tabel 1. 1

Data Pensiunan Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Kota Bekasi

Tahun	Jumlah Pensiunan
2022	557 Pensiunan
2023	564 Pensiunan
2024	570 Pensiunan

Sumber: PWRI Kota Bekasi, 2024.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah pensiunan di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah pensiunan ASN Pemerintah Kota Bekasi, yang meningkat dari 557 pensiunan pada tahun 2022 menjadi 570 pensiunan pada tahun 2024. Kenaikan jumlah pensiunan ini menunjukkan adanya peningkatan populasi individu yang beralih dari dunia kerja aktif menuju masa pensiun.

Menurut (Nurlianawati, 2021) menyatakan bahwa keberhasilan seseorang di usia lanjut bergantung pada keterlibatannya dalam aktivitas. Semakin lanjut usia, penting untuk tetap menjaga hubungan sosial, baik secara fisik maupun emosional. Lansia akan merasa puas dengan kehidupannya jika aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk bekerja. Selain itu, kemandirian menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas hidup lansia. Kemandirian tersebut memungkinkan mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik yang terbentuk melalui hubungan sosial dan kerja sama antar individu maupun kelompok. Kombinasi dari aktivitas, hubungan sosial, dan kemandirian berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup di usia lanjut. Secara garis besar, individu yang tetap terlibat dalam berbagai aktivitas, baik secara sosial, fisik, maupun intelektual, akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik setelah pensiun. Dalam hal ini, pemerintah dan para pensiun harus bersinergi dalam menciptakan program pelatihan dan aktivitas pasca pensiun yang memungkinkan lansia untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat.

Sejak kemerdekaan Indonesia, berbagai organisasi untuk pensiunan telah dibentuk di berbagai daerah, melibatkan anggota dengan latar belakang beragam. Beberapa organisasi lintas daerah yang signifikan meliputi Dewan Musyawarah Nasib Pensiunan (DMNP), Persatuan Bekas Pegawai Negara Indonesia (PBPNI), Persatuan Pensiunan Bumiputra (PPB), dan Persatuan Pensiunan Seluruh Indonesia (PPSI), yang merupakan hasil penggabungan beberapa organisasi pensiunan, seperti Kesatuan Kaum Pensiunan (KKP Solo) dan Persatuan Pensiunan Pegawai (PPP) Jatinegara.

Organisasi-organisasi ini mengadakan Kongres Persatuan Pensiunan pertama di Bandung pada 1956, diikuti kongres kedua di Solo pada 1957. Dari kongres ini, PPSI bergabung membentuk Dewan Presidium Persatuan Pensiunan Republik Indonesia (PPRI) yang menjadi wadah tunggal untuk para pensiunan. PPRI memiliki tujuh Komisariat Daerah, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara-Tengah, dan Sumatera Utara.

Pada 1962, Kongres Pensiunan di Yogyakarta menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Lahir dan Hari Ulang Tahun organisasi tersebut. Karena konflik nama dengan organisasi lain, nama PPRI kemudian diubah menjadi Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). Istilah "pensiunan" juga diganti dengan "wredatama"—berasal dari kata "wreda" (orang tua) dan "tama" (utama)—untuk menekankan bahwa anggota tetap memiliki peran penting sebagai warga negara yang aktif, berbeda dengan konsep pensiunan ala Belanda yang identik dengan beristirahat total dari tanggung jawab sosial. Perubahan ini mencerminkan semangat bahwa wredatama, meskipun telah purna tugas dari kenegaraan, tetap memiliki kontribusi dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Seiring berjalannya waktu, PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) bertambah di berbagai daerah, termasuk Kota Bekasi. Organisasi ini menjadi wadah bagi para pensiunan untuk tetap produktif, kreatif, dan berkontribusi melalui berbagai kegiatan. PWRI tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menjaga produktivitas anggota, tetapi juga memainkan peran penting dalam sinergi

dengan pemerintah Kota Bekasi untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial. Melalui penguatan kolaborasi ini, PWRI dapat meningkatkan kontribusinya dalam mengoptimalkan kualitas hidup para anggotanya sekaligus mendorong pembangunan sosial-ekonomi di Kota Bekasi. Hal ini menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan pensiunan secara berkelanjutan, salah satu wujud sinergi ini adalah pelaksanaan program pembebasan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan pembebasan 100% bagi veteran, perintis kemerdekaan, pensiunan ASN, purnawirawan TNI/Polri, serta mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, dengan syarat tertentu seperti domisili dan luas tanah maksimal 500 m².

Tujuan dari kebijakan ini adalah meringankan beban pajak para pensiunan dan kelompok prioritas lainnya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka di masa lalu. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi pajak dan mendukung program kesejahteraan yang berkelanjutan. PWRI, melalui kolaborasinya dengan pemerintah, tidak hanya menjadi ruang pemberdayaan para pensiunan, tetapi juga berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi anggotanya. Hal ini selaras dengan visi organisasi untuk menjadikan para wredatama sebagai individu yang tetap berdaya guna dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari wawancara dengan Drs. H. Amit Riyadi, M.Si., Ketua PWRI Kota Bekasi periode 2019–2024. Beliau menyoroti tantangan utama organisasi ini, termasuk kurangnya penyebaran informasi mengenai peran dan manfaat PWRI. Hal ini diperparah oleh sifat keanggotaan stelsel pasif. Menurut (Irawati, 2020) stelsel pasif ialah seorang individu tidak perlu mengambil tindakan hukum tertentu untuk mendapatkan status kewarganegaraan dalam sistem tertentu, melainkan secara otomatis dianggap sebagai bagian dari suatu negara atau kelompok. Dalam konteks ini, sistem tersebut memudahkan proses pengakuan kewarganegaraan tanpa prosedur tambahan yang diminta dari individu, berbeda dengan sistem yang mengharuskan tindakan aktif seperti mengajukan permohonan atau memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh status tersebut.

Dengan menganut sistem ini, anggota PWRI bergabung secara otomatis tanpa perlu mendaftar secara aktif, sehingga banyak pensiunan tidak sepenuhnya memahami fungsi organisasi ini. Dalam teori stelsel pasif, partisipasi atau status keanggotaan terjadi secara otomatis tanpa tindakan hukum tertentu dari individu. Sistem ini memudahkan pembentukan keanggotaan, tetapi sering kali menghadapi tantangan rendahnya kesadaran atau keterlibatan anggotanya. Dalam konteks PWRI, kondisi ini menghambat fungsi organisasi sebagai alat negosiasi *bargaining tool* antara para pensiunan dan Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.

Pengurus PWRI dibentuk melalui Musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar PWRI sebagai forum tertinggi dalam

pengambilan keputusan organisasi. Dalam musyawarah tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PWRI memiliki wewenang untuk menunjuk ketua PWRI di tingkat provinsi dan kota. Setelah terpilih, ketua yang telah ditunjuk bertanggung jawab dalam menyusun struktur kepengurusan dan menentukan jumlah kuota pengurus di setiap provinsi atau kota dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta cakupan wilayah kerja.

Tabel 1. 2
Daftar Pengurus PWRI Kota, Kecamatan, dan Kelurahan se-Kota Bekasi

Pengurus			Wilayah	Jumlah Pengurus (Tahun)			
Kota	Kecamatan	Kelurahan		2021	2022	2023	2024
Jumlah				188	188	239	238
Kota Bekasi			Kota Bekasi	18	18	18	18
	Bantar Gebang		Kecamatan	13	13	13	13
	Bekasi Barat		Kecamatan	17	17	17	17
	Bekasi Barat	Bintara	Kelurahan			9	9
	Bekasi Barat	Bintara Jaya	Kelurahan			8	8
	Bekasi Barat	Jaka Sampurna	Kelurahan			9	9
	Bekasi Barat	Kotabaru	Kelurahan			17	17
	Bekasi Barat	Kranji	Kelurahan			9	9
	Bekasi Selatan		Kecamatan	16	16	16	16
	Bekasi Timur		Kecamatan	16	16	16	15
	Bekasi Utara		Kecamatan	14	14	14	14
	Jatiasih		Kecamatan	12	12	12	12
	Jati sampurna		Kecamatan	14	14	14	14
	Medansatria		Kecamatan	13	13	13	13
	Mustikajaya		Kecamatan	12	12	12	12
	Pondokgede		Kecamatan	15	15	15	15
	Pondok melati		Kecamatan	13	13	13	13
	Rawalumbu		Kecamatan	15	15	15	15

Sumber: PWRI Kota Bekasi, 2024.

Para pengurus PWRI memiliki berbagai program yang dirancang khusus untuk meningkatkan produktivitas para pensiunan, salah satunya adalah Sekolah Lansia PWRI “GANTARI.” Program ini memberikan kesempatan bagi para pensiunan untuk tetap aktif dan berkarya sesuai dengan bidang kemampuan serta ketertarikan masing-masing. Melalui Sekolah Lansia “GANTARI,” para pensiunan tidak hanya mendapatkan wadah untuk menyalurkan hobi dan keterampilan mereka, tetapi juga memperluas wawasan, menjalin relasi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup di masa tua.

Tabel 1. 3
Daftar Kehadiran Pengurus dalam Kegiatan PWRI Kota Bekasi

Pengurus PWRI	Tahun	Jumlah Pengurus	Jumlah Kehadiran
Kota Bekasi	2022	18 Orang	9 Orang
	2023	18 Orang	11 Orang
	2024	18 Orang	10 Orang
Kecamatan Bekasi Barat	2022	17 Orang	8 Orang
	2023	17 Orang	9 Orang
	2024	17 Orang	7 Orang
Kecamatan Bekasi Selatan	2022	16 Orang	9 Orang
	2023	16 Orang	7 Orang
	2024	16 Orang	8 Orang
Kecamatan Bekasi Timur	2022	16 Orang	10 Orang
	2023	16 Orang	8 Orang
	2024	15 Orang	9 Orang
Kecamatan Bekasi Utara	2022	14 Orang	8 Orang
	2023	14 Orang	7 Orang
	2024	14 Orang	9 Orang

Sumber: PWRI Kota Bekasi, 2024.

Meskipun jumlah pensiunan terus bertambah, tingkat kehadiran pengurus dalam kegiatan PWRI Kota dan Kecamatan Bekasi masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pengurus dalam menjalankan kegiatan organisasi hanya berkisar 50-60%. Kegiatan tersebut meliputi rapat rutin, rapat

perencanaan program internal, dan penyiapan rencana kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Bekasi. Tantangan yang berdampak pada efektivitas organisasi dalam menjalankan program-programnya yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan para pensiunan dalam berorganisasi.

Ketimpangan antara meningkatnya jumlah pensiunan dan rendahnya kehadiran pengurus ini menjadi tantangan tersendiri bagi PWRI Kota Bekasi. Meskipun jumlah anggota potensial semakin besar, efektivitas organisasi dalam melaksanakan kegiatannya bisa terhambat jika keterlibatan pengurus masih terbatas. Peningkatan ini seharusnya memberikan peluang besar bagi organisasi untuk memperluas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merancang program yang bermanfaat, khususnya bagi para pensiunan ASN.

Selain itu, minimnya dukungan insentif yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi terhadap PWRI Kota Bekasi dinilai belum mencukupi untuk seluruh kebutuhan operasional dan program kerja yang telah direncanakan. Akibat keterbatasan insentif tersebut, berdampak terhadap motivasi dan partisipasi aktif para pengurus, serta menghambat terciptanya lingkungan organisasi yang produktif. Ketidaksesuaian antara semangat pengabdian para anggota dengan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas peran PWRI sebagai wadah aktualisasi diri bagi para pensiunan.

Selain rendahnya insentif, kendala lain yang dihadapi PWRI Kota Bekasi adalah minimnya motivasi pensiunan untuk bergabung dan aktif dalam organisasi. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran akan

pentingnya berorganisasi di kalangan para pensiunan. Tantangan ini menjadi hal yang krusial, mengingat organisasi seperti PWRI memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat keterlibatan sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta membangun sinergi yang lebih baik dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Terdapat pula permasalahan terkait program pelatihan dalam menghadapi pensiun bagi para pensiunan yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan mereka. Salah satu bentuk pelatihan yang selama ini diberikan adalah studi banding ke berbagai usaha seperti peternakan dan pertanian sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Namun, bagi sebagian pensiunan, program seperti ini kurang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka, sehingga manfaatnya menjadi kurang optimal.

Selain itu, waktu pelaksanaan pelatihan menghadapi pensiun juga dirasa terlalu dekat dengan masa pensiun tiba. Hal ini membuat para peserta merasa bahwa persiapan yang diberikan terlalu mendadak, sehingga mereka kesulitan dalam menyusun rencana serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan. Kurangnya waktu adaptasi ini dapat menghambat efektivitas program, karena para pensiunan belum memiliki cukup kesempatan untuk mencoba dan menyesuaikan keterampilan baru dengan kondisi kehidupan setelah pensiun.

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih berbasis pada minat dan *passion* individu agar mereka dapat menjalani masa pensiun dengan lebih produktif dan bermakna. Pelatihan sebaiknya diberikan jauh sebelum masa pensiun tiba, sehingga para peserta memiliki cukup waktu untuk memahami, mengembangkan, dan mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh. Dengan menyesuaikan program

pelatihan dengan kebutuhan serta minat masing-masing pensiunan, diharapkan mereka dapat lebih termotivasi untuk mengembangkan potensi diri dan tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi pasca-pensiun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi pensiunan dalam organisasi PWRI, mengungkap tantangan yang dihadapi, serta merumuskan saran strategis guna meningkatkan peran dan efektivitas PWRI sebagai sarana pemberdayaan pensiunan di Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam merancang strategi pengelolaan organisasi pensiunan yang lebih inklusi, adaptif, dan produktif.

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang kesiapan pensiun, pelatihan menghadapi pensiun, dan motivasi. Selanjutnya dijadikan sebagai penelitian yang berjudul: “Pengaruh Kesiapan Pensiun, Pelatihan Menghadapi Pensiun, dan Motivasi Pensiunan terhadap Kepuasan Berorganisasi di PWRI Kota Bekasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kesiapan pensiun berpengaruh kepada kepuasan berorganisasi di PWRI Kota Bekasi?
2. Apakah pelatihan menghadapi pensiun berpengaruh kepada kepuasan berorganisasi di PWRI Kota Bekasi?
3. Apakah motivasi pensiunan berpengaruh kepada kepuasan berorganisasi di PWRI Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesiapan pensiun terhadap kepuasan berorganisasi di PWRI Kota Bekasi.
2. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan menghadapi pensiun terhadap kepuasan berorganisasi di PWRI Kota Bekasi.
3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi pensiunan terhadap kepuasan berorganisasi di PWRI Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut:

1. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang isu utama dalam objek penelitian di organisasi yang diteliti. Penelitian ini juga memberikan kesempatan untuk menghubungkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan temuan empiris, termasuk membandingkannya dengan penelitian sebelumnya.

2. Bagi PWRI Kota Bekasi

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi PWRI Kota Bekasi untuk merancang program atau kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepuasan berorganisasi para anggotanya.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memotivasi peneliti lain untuk mengembangkan dan memperkuat teori-teori terkait kesiapan pensiun, pelatihan menghadapi, motivasi pensiun, serta kepuasan hidup, sehingga memperkaya literatur di bidang ini.

4. Bagi Almamater

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa. Selain itu, hasil penelitian juga menjadi kontribusi bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan khususnya di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mendukung aktivitas organisasi pensiunan, termasuk penyediaan fasilitas atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan para anggota PWRI Kota Bekasi.